

Airlangga Targetkan Golkar jadi Pemenang Pemilu 2024 dengan Raihan 48 Juta Suara

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto targetkan partai yang kini dipimpinya menjadi pemenang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menargetkan partai berlabang pohon beringin meraih 48 juta suara.

"Targetnya Partai Golkar menang di tahun 2024. Saudara tahu apa artinya menang? Menang itu namanya juara satu, kalau di olahraga juara satu medalnya emas, emas itu warnanya kuning," kata Airlangga dalam acara Konsolidasi Nasional Golkar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/10).

Airlangga menargetkan Partai Golkar meraih 20 persen suara pada pemilihan legislatif serta menempatkan 115 kadernya untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Airlangga menugaskan para anggota legislatif dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota untuk meraih

20.000 suara pada Pemilu 2024.

"Kalau 2.400 anggota DPR (hingga DPRD) mendapatkan minimal 20.000 suara saja, maka pemilih Partai Golkar itu bisa menjadi 48 juta," katanya.

Airlangga menilai, perolehan suara Golkar pada 2019 yang mencapai 17 juta suara terbilang kecil karena secara rata-rata satu orang anggota legislatif hanya mendapat 3.500 suara.

Sementara itu, Golkar juga menargetkan memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 60 persen daerah pada pilkada serentak 2024 mendatang. Ia mengatakan, target tersebut mesti diraih agar Golkar menciptakan sejarah di usianya yang ke-60 tahun pada 2024.

"Oleh karena itu dalam rangka 60 tahun Partai Golkar sesuai dengan acara hari ini maka kita ikrarkan kemenangan partai Golkar," kata Airlangga. ● **mei**

2 Polhukam

FOTO: ANT



TANGGAPAN JPU ATAS EKSEPSI SAMBO DAN PUTRI

Terdakwa Ferdy Sambo mengenai rompi tahan-usai menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (20/10). Dalam sidang tersebut JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, serta melanjutkan ke pemeriksaan saksi.

Nyatakan Siap Maju Capres, Ganjar Dinilai Tak Sabar karena PDI-P Kurang Agresif

Ganjar menyatakan siap maju jadi capres pada 2024. Hal ini tak sejalan arahan Megawati yang mewanti-wanti agar kadernya tak bermanuver soal pencapresan.

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bukan tanpa alasan menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres).

Politisi PDI Perjuangan itu dianggap tidak sabar karena

partainya belum juga melihat kendati Ganjar punya potensi besar sebagai capres.

"Statement Ganjar ini juga menunjukkan ketidaksabarannya melihat dinamika internal PDI-P yang kurang agresif," kata Umam kepada wartawan, Rabu (19/10).

Selain itu, pernyataan Ganjar bisa jadi merupakan

langkah reaktif atas manuver sejumlah tokoh yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden seperti Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan Anies Baswedan yang dicalonkan Partai Nasdem.

Ganjar dinilai berupaya memberikan sinyal positif ke partai-partai yang melirikinya sebagai capres, seperti Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Supaya tidak ketinggalan dan kehilangan momentum yang diciptakan, Ganjar akhirnya memilih tidak diam dan kembali berusaha meyakinkan partainya bahwa dirinya layak

dicapreskan," ucap Umam.

Kendati demikian, kata Umam, sikap Ganjar itu seolah tidak sejalan dengan arahan PDI-P sebelumnya. Berulang kali Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menanti-wanti agar kadernya tidak bermanuver soal pencapresan.

Ditegaskan pula oleh pimpinan partai banteng bahwa ihwal capres dan cawapres merupakan hak prerogatif ketua umum. Oleh karenanya, Umam menilai, sikap Ganjar yang terang-terangan menyatakan siap maju sebagai capres bisa dianggap *off side* karena mendahului elite partai lainnya.

"Sikapnya seolah selangkah lebih maju dibanding sikap elite PDI-P dan seolah ingin mengajari bagaimana pengambilan keputusan dibuat di internal partainya yang sebaiknya diputuskan lebih cepat dan mempertimbangkan betul respons para pendukungnya," ujarnya.

Umam menyebutkan, dinamika ini bisa memunculkan kembali sentilan-sentilan elite PDI-P ke Ganjar. Bukan tidak mungkin Gubernur Jawa Tengah itu akan kembali disebut kemajon (kelewatan) atau bahkan kemlinthi (congkak) karena berambisi menjadi capres.

Semestinya Ganjar bisa lebih bersabar melihat situasi politik yang berkembang.

"Jika Ganjar kembali bermanuver, seolah menekan atau bahkan mengurugi bagaimana keputusan pencapresan itu dilakukan di internal PDI-P, maka hal itu bisa menguatkan kembali resistensi politik di internal partainya," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan siap maju sebagai capres. Ganjar

mengaku bersedia menjadi calon RI-1 jika PDI-P berkenan mengungsunya.

"Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap," kata Ganjar dalam wawancara yang diunggah kanal YouTube BeritaSatu, Selasa (18/10).

"Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang mesti siap soal itu," tuturnya.

Kendati demikian, Ganjar mengatakan, dirinya menghormati etika politik di internal PDI-P. Bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu kini tengah membangun relasi dengan sejumlah partai politik untuk pemilu.

Namun, Ganjar juga bilang, ihwal survei seharusnya tak diabaikan dalam mempertimbangkan nama capres cawapres. Menurutnya, survei menjadi bagian dari suara rakyat.

"Tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan toh," ucap Ganjar.

Nama Ganjar memang selalu muncul di survei elektabilitas capres 2024. Dia bahkan kerap menduduki puncak survei, bersaing dengan sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Meski dianggap punya modal besar, Ganjar sebelumnya tak pernah menyatakan siap maju sebagai capres. Berulang kali Ganjar menyebutkan bahwa dirinya tunduk pada keputusan partai.

Elektabilitas besar juga tak membuat Ganjar jadi anak emas PDI-P. Berulang kali Ganjar justru disentil oleh elite partai banteng karena dinilai berambisi maju capres. ● **han**



FOTO: ANI

KEMENKES LARANG PEREDARAN OBAT SIRUP

Petugas mengumpulkan berbagai jenis merek obat sirup yang dilarang dijual untuk sementara waktu di salah satu apotek, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (20/10). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara semua penjualan obat bebas dalam bentuk sediaan cair atau sirup kepada masyarakat dan diminta nakes untuk tidak meresepkan obat-obatan sirup kecuali obat sirup kering sampai adanya pengumuman resmi dari pemerintah.

KSAL: TNI AL dan AL Perancis Siap Tingkatkan Kerja Sama Bidang Latihan

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Laut Perancis siap meningkatkan kerja sama di bidang latihan.

Pernyataan ini disampaikan Yudo dalam pertemuan bilateral dengan Chief of Staff of the French Navy, Admiral Pierre Vandier, usai menghadiri acara pembukaan Euronaval 2022 di Paris Le Bourget, Perancis, Selasa (18/10).

"TNI Angkatan Laut (TNI AL) akan selalu siap untuk meningkatkan kerja sama dengan Angkatan Laut Perancis," kata Yudo dalam keterangan tertulis Dispenal, Kamis (20/10).

Yudo berharap adanya interaksi melalui latihan ini membuka peluang untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam bidang

operasi. Khususnya, operasi dalam hal pengamatan dan pendeteksian maritim, baik pada kapal permukaan atau pun kapal bawah permukaan.

Pierre Vandier juga menawarkan bentuk kerja sama bidang latihan, salah satunya melaksanakan passing exercise (Passsex). Serta, serial latihan bersama dengan Gugus Tugas Armada Angkatan Laut Perancis saat melintas di perairan Indonesia sesuai jadwal yang ditentukan pada Maret 2023 mendatang.

Dalam lawatannya ke Perancis, Yudo menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa booth produsen teknologi sensor dan senjata. Ia juga menerima pemaparan tentang perkembangan teknologi terbaru dari beberapa produsen seperti MBDA Missile System, Thales, Damen, Naval Group, Abeking & Resmussen, serta beberapa produsen lainnya. ● **han**

Korupsi Proyek Satelit Orbit, Penyidik Sita 3.022 Meter Lahan Milik PT DNK

JAKARTA (IM) - Tim Penyidik Koneksitas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) menyita lahan milik PT Dini Nusa Kesuma (DNK) seluas 3.022 meter persegi.

"Penyitaan terhadap beberapa aset milik PT Dini Nusa Kesuma (PT DNK) dan milik para tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2012-2022," kata Kapuspemkom Kejaksaan Agung Ketut Sutedana, Kamis (20/10).

Lebih lanjut Ketut mengatakan, penyidik koneksiitas tersebut dari unsur Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Kejaksaan Agung RI. Sebelum melakukan penyitaan penyidik terlebih dahulu melakukan pemblokiran terhadap aset yang hendak disita.

Pemblokiran lahan di-

lakukan dengan berkoordinasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan dilanjutkan dengan kegiatan penyitaan yang dipimpin oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta kelurahan setempat.

"Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dan pengembalian kerugian keuangan negara," pungkaskas Ketut.

Berikut ini sejumlah aset yang disita penyidik:

- Satu bidang tanah dan bangunan yang merupakan kantor PT DNK di Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan seluas 1.265 meter persegi.

- Satu bidang tanah dan bangunan di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan seluas 1.239 meter persegi.

- Satu bidang tanah dan bangunan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan seluas 518 meter persegi. ● **han**

Mahfud Sebut Prabowo Telah Proyeksikan Kebutuhan Pertahanan hingga 25 Tahun

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, telah membuat proyeksi persenjataan hingga 25 tahun ke depan.

Hal itu termasuk soal biaya dan pertambahan senjata tiap tahunnya.

"Pemerintah katakan ini harus, persenjataan, keahlian kita harus disiapkan. Itu sudah diproyeksikan sekarang 2022, Pak Prabowo sudah menghitung 25 tahun ke depan," kata Mahfud dalam diskusi bersama Rocky Gerung di RGTV Channel ID, Selasa (19/10).

"Sudah dihitung semua, pertambahan setiap tahunnya berapa kemudian biayanya dari mana, dapat dari mana, sudah dihitung bersama Kementerian Keuangan," ujarnya.

Menurut Mahfud, Indonesia masih perlu menambah persenjataan. Ia menilai, hal ini sesuai dengan perkataan Prabowo.

"Kalau kita hanya berpikir soal kemampuan atau kekuatan persenjataan kita memang sangat-sangat mencemaskan. Bukan mencemaskan, tapi sangat mencemaskan," ujarnya.

Mahfud menjelaskan bahwa Indonesia kecurangan Pesawat tempur. Dari perhitungan

an Prabowo, Indonesia setidaknya memiliki 200 pesawat tempur. Namun, saat ini Indonesia hanya punya 17 pesawat tempur.

"Kita baru punya pesawat 17 yang tertentu. 17 ini pun, dua sudah dikanibal, sudah diiniani," ujarnya.

Begitu juga dengan kondisi senjata tembak maupun kapal perang di Indonesia.

"Kapal perangnya, senjata juga yang jarak tembaknya 200.000 Km misalnya atau 200 Km kita misalnya punya berapa. Sementara kebutuhan dengan luasan seperti ini kita sudah menghitung semua," tuturnya.

Mahfud menyebut, proposal soal proyeksi persenjataan itu kini tengah dihitung kembali guna menghadapi ancaman pertahanan.

"Kemengan itu sudah mengajukan proposal kepada presiden dan sekarang sedang dihitung ulang agar cermat menghitungnya, sehingga kita nanti akan menyediakan senjata seperti cara orang Jepang menyikapi negara negara lain," ucapnya.

Namun, Mahfud menyekalkan optimis dengan kondisi saat ini dan mengangap remeh kemungkinan perang.

"Ada juga yang optimis, 'buat apa sih senjata-senjata

gitu. Perang kayak gitu enggak akan ada, sekarang itu kan perang IT saja sebenarnya. Proxy yang banyak dikhawatirkan proxy sebenarnya bukan perang seperti itu," ucap dia.

Sementara itu, dalam beberapa kesempatan, Prabowo mengungkapkan, dirinya ditugaskan Jokowi merencanakan kebutuhan pertahanan Indonesia yang bersifat jangka panjang. Hal ini agar ada konsistensi kebijakan di bidang persenjataan.

"Jadi memang sesuai perintah Pak Presiden Joko Widodo dua setengah tahun yang lalu untuk membuat suatu desain besar, master plan pertahanan negara, menyangkut juga bagaimana kita bisa mengamankan alur-alur laut kepulauan Indonesia di mana 60% perdagangan laut dunia lewat perairan kita," tuturnya.

Prabowo menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah yang perlu dijaga. Ia mencontohkan ikan dan kekayaan mineral di bawah laut seperti gas dan minyak bumi itu per luar desain matang untuk keamanan negara.

"Kekayaan kita sangat besar di wilayah ini sangat-sangat besar tidak hanya kekayaan ikan tetapi juga kekayaan mineral di bawah laut, gas dan minyak bumi di bawah laut," ujarnya. ● **mei**

Siulan Masuk Kategori Pelecehan Seksual dan Korban Bisa Melaporkannya ke Polisi

JAKARTA (IM) - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid menjelaskan tolak ukur "siulan" yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 73 tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekeerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Tolak ukur dari siulan yang mengandung unsur kekerasan seksual, diukur dari rasa kenyamanan objek. Apakah korban merasa nyaman atau tidak, merasa dirugikan atau tidak, merasa diredahkan martabatnya atau tidak.

"Karenanya delik yang digunakan dalam perkara ini adalah delik aduan. Yaitu delik yang hanya dapat diproses apabila dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban," kata Zainut dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/10/2022).

Sementara itu, dalam ayat (1) pasal 18 PMA yang mengatur tentang sanksi ini disebutkan jika pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif.

Sementara dalam ayat (2) disebutkan Sanksi pidana se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi pemberlakuan sanksi pidana basisnya adalah putusan pengadilan dan berlaku mekanisme hukum sebagaimana diatur undang-undang. Adapun UU yang dimaksud misalnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 16 bentuk kekerasan seksual tertuang dalam pasal 5 di PMA ini salah satunya adalah siulan dan tatapan bernuansa seksual. Bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam PMA tersebut juga mencakup verbal, nonfisik, fisik, dan teknologi infomasi dan komunikasi.

PMA ini hanya mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Satuan Pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan. ● **han**



FOTO: ANTARA

SIDANG UJI MATERIIL UU PEMILU

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto (kiri) dan Hakim Konstitusi Saldi Isra (kanan) mendengarkan keterangan dari ahli pemohon saat sidang uji Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Kamis (20/10). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dari dua ahli pemohon.